

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya agar penelitian dapat terus berkembang. Referensi yang digunakan dari penelitian terdahulu pun beragam baik dari topik yang diambil hingga metode yang digunakan dalam melakukan penelitian tersebut. Adapun tujuan fungsi pokok dari referensi berupa penelitian terdahulu adalah membantu untuk memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi.

Pada penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo, ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai rujukan atau referensi. Pertama, Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Perempuan Melalui Program P3EL Kabupaten Sidoarjo oleh Effy Wardati Maryam Dalam Psikologia / Vol. : 3 No. 1 , Januari 2015. Kedua, Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Bandung Encang Saepudin dalam Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 20, No. 1, Maret 2018. Ketiga, Partisipasi Publik Dalam Program Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Oleh Yuli Tusiono Dalam Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 3 No. 2 Agustus 2017. Keempat, Studi Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Pnpm Mandiri Di Sumatera Barat

Oleh Ermawati Dalam Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Juni 2018, Vol. 20 No 1 . Kelima, Analisis Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gerokgak, Buleleng-Bali oleh Putu Riska Wulandari dkk dalam Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 2, Agustus 2014.

Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yakni terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Perempuan Melalui Program P3EL Kabupaten Sidoarjo  Effy Wardati Maryam Dalam Psikologia / Vol. : 3 No. 1 , Januari 2015.	Hasil dalam penelitian ini yaitu program berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan atau pemberdayaan yang diselenggarakan oleh BPMKB, meskipun terkadang pelatihan yang diberikan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan para anggota P3EL dan kegiatan pelatihan ini tidak dapat diikuti oleh semua anggota Program P3EL. Perempuan yang menjadi anggota program ini biasanya berpartisipasi dengan membentuk kerjasama antar anggota kelompok agar memperoleh dukungan dari anggota	Pada penelitian ini sama-sama berfokus pada partisipasi masyarakat terhadap suatu program. Sama-sama menggunakan penelitian deskriptif. Perbedaannya pada penelitian menggunakan program P3EL, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni Program Keluarga Harapan.

		lainnya. Anggota program memberikan sumbangan pemikiran berupa usulan-usulan mengenai program kegiatan yang memang dibutuhkan oleh anggota P3EL. Ada pula faktor-faktor yang mendorong anggota melakukan partisipasi terhadap pengentasan kemiskinan yaitu motif egoisme dan motif kolektif.	
2.	<p>Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Bandung</p> <p>Encang Saepudin dalam Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 20, No. 1, Maret 2018</p>	<p>Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat baik pada perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat dikategorikan menjadi positif yang artinya partisipasi anggota cukup aktif. Hal ini didasarkan pada perhitungan statistik yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri pangan dapat dikategorikan menjadi dua yakni hitungan secara kuartil dan skor kumulatif. Hasilnya yakni partisipasi masyarakat di Desa Mekarlaksana kabupaten Bandung pada pengambilan keputusan, evaluasi, dan perencanaan dinilai cukup aktif.</p>	<p>Pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai partisipasi masyarakat pada suatu program dari pemerintah. sama-sama menggunakan metode deskriptif. Perbedaannya yakni pada lokasi penelitian, penelitian selanjutnya dilakukan di Desa Mojorejo Kota Batu. Pengumpulan data pada penelitian sebelumnya menggunakan kuantitatif dengan penyebaran angket, sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p>

3.	<p>Partisipasi Publik Dalam Program Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus</p> <p>Yuli Tusiono Dalam Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 3 No. 2 Agustus 2017</p>	<p>Partisipasi masyarakat publik di Kelurahan Tangkit bisa dikatakan cukup baik, sebab masih ada masyarakat yang aktif dan pasif. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa PKH adalah program yang tidak diharuskan dicampur tangani oleh masyarakat publik. Pada penyelenggaraan PKH, hendaknya peran pemerintah yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat penerima PKH maupun yang belum menerima. Sehingga masyarakat bisa mengerti sasaran dari Program PKH.</p>	<p>Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengamati tentang partisipasi masyarakat pada PKH. Perbedaannya subjek pada penelitian sebelumnya yaitu masyarakat publik atau masyarakat umum, sedangkan dalam penelitian ini subjek yang dipilih yakni masyarakat penerima PKH.</p>
4.	<p>Studi Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Pnpm Mandiri Di Sumatera Barat</p> <p>Ermawati Dalam Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Juni 2018, Vol. 20 No 1</p>	<p>Hasil pada penelitian ini adalah salah satu prinsip pemberdayaan adalah menekankan pada banyaknya partisipasi masyarakat pada program yang dilakukan, partisipasi masyarakat harus aktif. Namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pnpm di Sumatera Barat masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor internalnya yaitu mengenai umur, jenis kelamin, status, jenis pekerjaan, maupun jenjang pendidikan. Faktor eksternal yaitu partisipasi masyarakat</p>	<p>Penelitian sama-sama memiliki fokus yang diarahkan pada partisipasi masyarakat pada program pemerintah. sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu studi kasus, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan.</p>

		dipengaruhi oleh respon, kehadiran dan keaktifan berdiskusi dalam pertemuan rutin yang dilaksanakan.	
5.	<p>Analisis Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gerokgak, Buleleng-Bali</p> <p>Putu Riska Wulandari dkk dalam Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 2, Agustus 2014</p>	<p>Hasil dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dan kepemimpinan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan suatu program. Kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Jadi tingkat keberhasilan PNPM di Kecamatan Gerokgak dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan juga evaluasi terhadap program tersebut. Kepemimpinan yang baik dapat berperan sebagai pendorong masyarakat agar selalu berpartisipasi pada program mandiri pedesaan tersebut.</p>	<p>Penelitian sama-sama berfokus pada partisipasi masyarakat. Perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif.</p>

*Sumber : data yang diolah tahun 2019*

## 2.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan dalam proses pengambilan keputusan mengenai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan keterlibatan seseorang dalam bertanggung jawab pada persoalan tersebut. menurut Keith

Davis, menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental maupun perasaan/emosi individu dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok tersebut sebagai bentuk usaha dalam pencapaian tujuan serta turut bertanggung jawab dalam usaha tersebut. batasan dari partisipasi itu sendiri yakni meliputi pengambilan keputusan atau pelaksanaan program tersebut (Moh Solekhan, 2014:142).

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat tertentu yang bersifat kontinyu atau berkelanjutan diikuti seratai oleh suatu rasa identitas bersama atau terikat. Masyarakat memiliki 4 ciri-ciri yaitu : interaksi antar individu, adat istiadat, bersifat kontinyu, dan rasa identitas yang mengikat warga sangat kuat (Koentjoroningrat, 2009:117). Menurut Selo Soemardjan, masyarakat yaitu sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah yang sama, mempunyai kebiasaan atau tradisi, identitas yang kuat sehingga dapat membentuk atau menghasilkan suatu budaya (Triyanto, 2016:320).

Partisipasi masyarakat yaitu suatu bentuk keikutsertaan atau turut berperan dalam setiap kegiatan atau program yang sedang dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Menurut Cohn, partisipasi merupakan keterlibatan individu atau masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, dan mengevaluasi program. Menurut Dr. Siti Irene Astuti, partisipasi adalah bentuk keterlibatan orang dalam suatu kegiatan berupa keterlibatan mental, fisik maupun emosi (Faiz Aminuddin, 2016:224).

Adisasmita (dalam Moh. Solekhan, 2014: 141), mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat yakni keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan yang meliputi perencanaan program dan pelaksanaan program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal”. Undang-undang no 25 tahun 2004 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yakni keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat berkurang apabila mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan suatu program pembangunan.

Tujuan utama partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan yaitu mengenai pengambilan keputusan. Seperti yang dikemukakan oleh Saboff bahwa tujuan utama partisipasi masyarakat itu sendiri adalah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mendorong dan melibatkan masyarakat untuk menyatukan tujuan (Moh. Solekhan, 2014:143). Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan maka pelaksanaannya harus didasarkan dengan kebiasaan masyarakat setempat atau disesuaikan dengan kebudayaan yang ada di wilayah tersebut.

Munculnya partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh 2 faktor (Siti Robiah, 2017:06), yaitu :

#### 1. Faktor internal

Faktor internal yakni faktor yang berasal dari diri sendiri. Karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu itu sendiri dalam berpartisipasi

dalam suatu kegiatan di masyarakat yakni umur, jenis kelamin, status, tingkat pendidikan, etnis, agama, bahasa, pekerjaan, dan jarak rumah dengan lokasi aktivitas.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari pihak luar. Pihak luar juga mempunyai pengaruh terhadap partisipasi antara lain tokoh masyarakat, pemerintah daerah, ataupun pihak ketiga.

Verhangen (dalam Aprilia Theresia) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk interaksi antar individu maupun kelompok yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Suatu interaksi pada individu maupun kelompok dilandasi oleh kesadaran diri dari individu ataupun masyarakat tersebut (Arthur Lomboh, 2015: 04), kesadaran tersebut mengenai:

1. Kondisi dalam kehidupan yang kurang memuaskan dan perlu untuk diperbaiki.
2. Kondisi kehidupan tersebut bisa diperbaiki melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat itu sendiri.
3. Kampuan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bisa dilakukan oleh individu tersebut.
4. Memiliki rasa percaya diri, bahwa dirinya mampu memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Menurut Cohen dan Uphoff (Siti Robiah, 2017:06), bentuk partisipasi dibedakan menjadi 4 yaitu :



1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud dalam partisipasi ini yakni menyumbangkan gagasan, kehadiran dalam rapat, dan pada saat diskusi selalu memberikan tanggapan terhadap program yang akan dilakukan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber dana atau kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi ini merupakan kelanjutan dalam rencana yang digagas sebelumnya.
3. Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan mengenai kualitas maupun kuantitas.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar mengetahui tingkat keberhasilan program tersebut.

Slamet (dalam Juli Astuti, 2019: 24), menjelaskan bahwa partisipasi dapat tumbuh atau muncul sangat ditentukan oleh tiga hal, yakni:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Pada implementasi setiap program pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sosialisasi. Sosialisasi dilakukan guna menghindari adanya pandangan atau perepsi yang salah diantara masyarakat. Pada kenyataan yang terjadi setiap program pemberdayaan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat disebabkan kurangnya kesempatan dan informasi yang diberikan

kepada masyarakat, mengenai kapan kegiatan dilakukan, dan dalam bentuk apa saja masyarakat harus berpartisipasi.

2. Adanya kemauan masyarakat dalam berpartisipasi.

Minat atau kemauan ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat untuk memperbaiki hidup individu tersebut, hal ini menyangkut sikap: a) Menghilangkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan, b) Selalu ingin memperbaiki taraf hidup dan tidak mudah puas diri, c) Kebersamaan untuk memecahkan segala permasalahan dan demi tercapainya tujuan pembangunan, d) Mandiri dan percaya diri mengenai kemampuan yang dimiliki untuk memperbaiki kehidupan.

3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengerakkan partisipasi masyarakat akan tidak berarti apabila masyarakat tersebut tidak memiliki kemampuan untuk : a) Menemukan dan memahami kesempatan untuk membangun, b) Melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, c) Memecahkan masalah yang dihadapi dengan kemampuan yang dimiliki secara optimal.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya partisipasi yakni kebutuhan dan penghargaan. Agar menciptakan masyarakat tersebut “butuh” maka diperlukan adanya sosialisasi yang mendalam akan manfaat program tersebut bagi masyarakat, terutama mengenai peningkatan kesejahteraan hidup atau ekonomi keluarga tersebut, sedangkan penghargaan

berkaitan erat dengan motivasi yang sifatnya memanjakan. Namun faktor yang paling dominan yang paling menentukan partisipasi adalah kebutuhan.

Manfaat partisipasi yakni menjadi masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Manfaat partisipasi yang pertama yakni menghilangkan perasaan terasing, sebab berturut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan perasaan bahwa diri seseorang ikut menjadi bagian dalam masyarakat. Kedua, menimbulkan dukungan pada setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka akan menunjukkan bahwa masyarakat tersebut mendukung program tersebut. Ketiga, menciptakan kesadaran politik, partisipasi dapat menumbuhkan pendidikan nyata, sehingga seseorang dapat belajar demokrasi. Keempat, sebagai sumber informasi yang berguna bagi masyarakat lainnya.

### **2.3 Kemiskinan**

Menurut Usman Kemiskinan adalah kondisi dimana individu atau kelompok kehilangan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan hidup yang serba kekurangan (Solikaturun, 2014: 75). Menurut Schiller (Bagong Suyanto, 2001: 29), kemiskinan merupakan kondisi dimana individu tidak sanggup untuk mendapatkan barang-barang maupun pelayanan yang memadai guna memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Pada segi ekonomi, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai dengan serba kekurangan, seperti kekurangan pendidikan, kondisi kesejahteraan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemiskinan merupakan kondisi dimana tidak

mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Kemiskinan dapat terjadi karena kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses untuk pendidikan dan bekerja.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang global. Penyebab terjadinya kemiskinan antara lain (Solikaturun, 2014: 76) :

1. Penyebab individual, kemiskinan sebagai akibat dari perilaku atau pilihan dari individu tersebut.
2. Penyebab keluarga, kemiskinan dapat terjadi karena pendidikan keluarga. Penyebab kemiskinan juga dapat terjadi karena budaya atau kebiasaan yang dilakukan sehari-hari pada lingkungan sekitar seperti keluarga.
3. Penyebab agensi, kemiskinan sebagai akibat dari orang lain seperti pemerintah, perang, dan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi rendah.

Menurut akar penyebab yang melatar belakangi terjadinya kemiskinan, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori yakni kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (Bagong Suyanto, 2001: 34). Kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang terjadi karena sumber daya yang langka dan perkembangan teknologi yang masih rendah. Jadi faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin adalah alami atau memang ada. Kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang membuat masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi atau fasilitas secara merata.

Menurut Robert Chambers, kemiskinan juga dapat terjadi karena perangkap kemiskinan. Menurutnyanya terdapat lima unsur perangkap kemiskinan yaitu : (1)

Kemiskinan itu sendiri, (2) Kelemahan fisik, (3) Ketersaingan, (4) Kerentanan, dan (5) Ketidakberdayaan.

Berdasarkan kelima dimensi diatas, kerentanan dan ketidakberdayaan menjadi unsur yang perlu mendapatkan perhatian utama. Kerentanan dapat dilihat dari ketidakmampuan suatu keluarga untuk menyediakan kebutuhan atau simpanan untuk menghadapi situasi darurat seperti bencana alam atau sakit yang tiba-tiba menyerang keluarga tersebut.

Menurut para sosiolog kemiskinan dibedakan menjadi dua (Sulistya Wardana, 2018: 72) yakni:

1. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang terjadi saat individu tidak bisa memperoleh kebutuhan untuk mendukung kesehatan fisik dan efisiensi minimal, atau tidak tercukupinya nutrisi dalam tubuh.

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang ditentukan dari standar hidup secara umum dalam masyarakat dan kemiskinan yang ditentukan berdasarkan pada definisi kemiskinan absolut. Kemiskinan dikatakan relatif apabila standar kehidupan dinikmati oleh sebagian besar individu dalam keluarga, tingkat kemiskinan pun berbeda diantara berbagai masyarakat dari waktu ke waktu.

Menurut Sutinah, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan guna mengurangi kemiskinan (Diyah Ayu, 2015: 312), strategi yang perlu dikembangkan antara lain :

1. Rangkaian sosial yang saling berhubungan membentuk suatu kerjasama guna memenuhi kebutuhan hidup.
2. Strategi yang disusun guna mengatasi kesulitan seperti melakukan berbagai macam usaha dari sumber yang ada guna meningkatkan pendapatan.
3. Strategi dalam menghadapi masa depan yakni dengan cara investasi atau menabung, mengikuti berbagai pelatihan guna meningkatkan keterampilan, yang sesuai dengan keperluan pasar.
4. Strategi hidup berhemat, hal ini dapat diterapkan pada masing masing individu dengan cara mengatur pengeluaran belanja dan tidak menjadi individu yang konsumtif.

Selain itu juga terdapat beberapa strategi yang harus dilaksanakan pemerintah guna untuk mengatasi kemiskinan yakni antara lain (nano Purwanto, 2009 :56) :

1. Kemiskinan bersifat multidimensional, sebaiknya program pengentasan kemiskinan tidak hanya memprioritaskan dalam bidang perekonomian saja tetapi juga dalam bidang atau dimensi lainnya. Langkah pengentasan kemiskinan yang efektif juga wajib mengatasi hambatan yang bersifat sktruktural maupun politis.

2. Upaya peningkatan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan peningkatan kemampuan masyarakat miskin melalui langkah-langkah perbaikan kesehatan, pendidikan, peningkatan keterampilan masyarakat, teknologi modern, dan juga perluasan jaringan,
3. Melibatkan masyarakat atau masyarakat miskin berpartisipasi dalam proses penanggulangan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan serta pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga evaluasi.
4. Strategi dalam pemberdayaan. Kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di daerah agraria merupakan kelompok yang mampu untuk membangun dirinya sendiri jika pemerintah memberikan kebebasan pada kelompok masyarakat tersebut.

Beberapa unsur yang diperlukan guna untuk menunjang keberhasilan strategi penanggulangan kemiskinan antara lain yaitu (nano Purwanto, 2009 :65) :

- a. Strategi atau upaya penanggulangan kemiskinan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh atau merata, terpadu, dan sesuai dengan kondisi dan budaya lokal yang ada.
- b. Memberikan perhatian penuh pada tahap proses, dan tidak lupa juga memperhatikan hasil akhir yang hendak didapatkan nantinya. Membiarkan masyarakat miskin untuk merasakan proses keluar dari rantai kemiskinan.
- c. Upaya yang dilakukan hendaknya melibatkan dan hasil proses perencanaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat miskin itu sendiri.

- d. Pemerintah beserta pihak-pihak lainnya (perguruan tinggi, partai politik, dan lembaga sosial) dapat bekerja sama untuk kekuatan yang saling mendukung.

## 2.4 Evaluasi Program

Menurut Arif Djamaludin defini program merupakan serangkaian gerak atau aktivitas tindakan dari bersumber dari kerjasama antara unsur tenaga manusia, waktu atau pun barang beserta dengan kegiatan yang bersifat pembangunan dan menghasilkan suatu output yang dijadikan sebagai tujuan (Kasni Hariwoeryanto, 1987:45). Menurut Ralph Tyler mengemukakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses aktivitas untuk menentukan sejauhmana tujuan atau *goals* dalam suatu program dapat tercapai (Djudju Sudjana, 2008:19). Evaluasi program merupakan aktivitas yang mencakup mengenai pengukuran, terutama dalam hal penilaian mengenai pengeluaran dan pengaruh dari program yang dilaksanakan. Menurut Stake, menjelaskan bahwasannya evaluasi program merupakan salah satu kegiatan untuk merespon suatu program yang sedang, telah ataupun yang akan dilaksanakan (Djudju Sudjana, 2008:21).

Tujuan dari evaluasi yakni berfungsi sebagai suatu pengarah bagi kegiatan yang dilakukan dan sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas kegiatan evaluasi program. Tujuan evaluasi terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum evaluasi program sendiri adalah untuk menyajikan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan khusus dari evaluasi program adalah memeberi masukan mengenai



kebijakan, hasil program, tanggapan masyarakat terhadap program, sumber daya dalam program, dan juga dampak program (Djudju Sudjana, 2008:35).

Menurut Willian N. Dunn dalam evaluasi program terdapat enam kriteria pada saat melakukan penilaian (Denhani, 2018:50), antaranya yaitu :

#### 1. Dimensi Efektifitas

Pada dimensi ini yakni ingin mengetahui apakah hasil program yang dijalankan sudah sesuai dengan harapan. pada bagian ini sering dibahas mengenai bermfaat atau tidaknya program yang sedang dilaksanakan dan mengenai kepuasan dari anggota program.

#### 2. Dimensi Efisiensi

Pada dimensi ini terdapat beberapa hal yang dipertanyakan yakni mnegenai seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada kriteria efisiensi ini terdapat tiga indikator yakni biaya bantuan, waktu, dan tenaga.

#### 3. Dimensi kecukupan

Pada dimensi ini dapat diketahui berupa seberapa jauh hasil yang sudah dicapai dalam program yang dilaksanakan. Pada dimendsi ini juga memiliki dua indikator yakni indikator pemenuhan kebutuhan, dan indikator kecukupan nominal terhadap pemenuhan kebutuhan anggota.

#### 4. Dimensi Pemerataan

Pada dimensi ini adalah untuk mengetahui apakah manfaat dari adanya program tersebut dapat dirasakan secara merata oleh semua anggota pada program tersebut.

#### 5. Dimensi responsivitas

Pada dimensi ini dapat diketahui apakah hasil dari kebijakan yang telah dibuat dapat memberikan kepuasan terhadap anggota program tersebut. pada dimensi ini memiliki beberapa indikator yakni pengetahuan yang didapatkan oleh anggota pada saat pelaksanaan program dan kepuasan dari anggota program itu sendiri.

#### 6. Dimensi ketepatan

Pada dimensi ini akan diketahui apakah dengan adanya pelaksanaan program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hasil dari program yang sudah tercapai apakah bisa bermanfaat. Sasaran pada program tersebut harus tepat sesuai dengan kriteria agar program dapat bermanfaat.

Sebagian model evaluasi berupa rancangan teoritis yang disusun oleh beberapa ahli, sebagian dikembangkan berdasarkan pada evaluasi di lapangan, dan sebagian berupa konsep dan petunjuk teknis. Menurut Djudju (Djudju Sudjana, 2008: 51), evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi beberapa model atau kategori antaranya yaitu :

1. Model evaluasi terfokus pada pengambilan keputusan.
2. Model evaluasi terhadap unsur-unsur program.
3. Model evaluasi terhadap jenis kegiatan program.

4. Model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program.
5. Model terhadap pencapaian tujuan program.
6. Model terhadap hasil dan pengaruh program.

Pada kategori diatas terfokus pada hasil dan unsur-unsur sistem yang telah digunakan dalam program sehingga dapat berguna untuk memperbaiki program pada saat program tersebut dijalankan.

## **2.5 Program Keluarga Harapan Sebagai Program Pengentasan Kemiskinan**

Menurut Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, yang disampaikan melalui pertemuan kelompok secara rutin satu bulan sekali (Pedoman PKH, 2017:25). PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. PKH biasanya diberikan setiap tiga bulan sekali melalui kantor pos terdekat atau dana bisa masuk langsung ke ATM yang diberikan oleh pihak pemerintah. PKH hanya diberikan kepada keluarga sangat miskin jika pada saat registrasi memenuhi ketentuan:

1. Memiliki anak berusia 0-6 tahun;
2. Memiliki anak berusia < 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD & SMP);
3. Terdapat ibu yang sedang hamil/nifas.

4. terdapat anggota keluarga yang disabilitas

Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan hidup terutama kelompok masyarakat miskin dan mengurangi kemiskinan. Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum PKH yaitu untuk memutus rantai kemiskinan dan menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku dan pola pikir RTSM agar mengalami peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Adapun secara khusus, tujuan dari Program Keluarga Harapan (Deddy Utomo, 2016:29-34) terdiri atas:

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM;
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

Ketentuan waktu pelaksanaan PKH adalah diselenggarakan minimal 1 kali dalam sebulan. Pada 1 sesi harus tersampaikan pada 1 kali pertemuan dan penentuan sesi disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi anggota PKH. Penyampaian informasi berlangsung sesuai dengan ketentuan yang dibuat pada panduan yakni maksimal 120 menit. Waktu penyelenggaraan dapat disesuaikan antara pendamping PKH dan anggota PKH sendiri. Modul PKH saat ini terdiri dari 14 sesi, jika 14 sesi tersebut sudah selesai atau sudah tersampaikan semua

maka pendamping wajib mengulangi materi tersebut untuk mengingatkan kepada anggota PKH (Pedoman PKH, 2018).

Penyaluran bantuan sosial PKH ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran dana diberikan sebanyak empat tahap dalam waktu satu tahun. Jumlah bantuan yang diberikan memiliki kriteria atau indeks masing-masing. Pada tahun 2018 (Permensos no 1 tahun 2018), indeks bantuan PKH yakni sebagai berikut : (a) Bantuan Sosial PKH Rp. 1.000.000, (b) Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.400.000, (c) Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.400.000, (d) Ibu Hamil Rp. 2.400.000, (e) SD Rp. 900.000, (f) SMP Rp. 1.500.000, dan (g) SMA Rp. 2.000.000,.

Program Keluarga Harapan memiliki 2 buku bahan ajar. Yaitu modul dan buku pintar. Materinya terdiri dari 5 modul dan 5 buku pintar yang mencakup tentang materi pendidikan dan pengasuhan anak, mengenai ekonomi keluarga tentang cara bagaimana mengelola keuangan keluarga dan perencanaan usaha yang bisa dilakukan oleh penerima bantuan, modul tentang kesehatan yang berisi tentang pentingnya gizi yang cukup untuk ibu hamil dan anak usia dini dan mengenai kebersihan lingkungan, modul perlindungan anak yang berisi tentang pencegahan kekerasan pada anak dan penelantaran anak, dan yang terakhir yakni modul kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia yang berisi mengenai pelayanan yang harus dilakukan kepada penyandang disabilitas berat dan juga usaha yang dapat dilakukan untuk mensejahterakan lansia.

Peraturan Menteri Sosial no. 01 tahun 2018 telah dijelaskan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga penerima PKH antara lain :

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil atau menyusui dan anak berusia 0 hingga 6 tahun;
2. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tingkat kehadiran 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun atau hingga tamat SMA;
3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun atau penyandang disabilitas berat.

Manfaat bantuan Bantuan yang diberikan kepada keluarga sangat miskin yang mengikuti program ini adalah uang tunai Rp900.000-Rp2.400.000/tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan tersebut menjadi insentif bagi keluarga sangat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan begitu, kesejahteraan ibu dan anak dapat dijaga dengan baik sehingga keluarga sehat dapat terwujud serta terpenuhinya pendidikan dasar bagi anak.

## **2.5 Kerangka Teori**

### **Teori Tindakan Voluntaristik (Talcott Parsons)**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori tindakan voluntaristik Talcott Parsons. Talcott Parsons merupakan salah satu tokoh teori sosiologi yang terpenting dalam teori aksi sosial. Hal ini dapat terlihat dari pemikiran Talcott Parsons yang banyak membahas mengenai teori aksi sosial. Bidang kajian pertama kali Talcott Parsons adalah teori tindakan voluntaristik yang merupakan ilustrasi dari perdebatan pada positivistik. Parsons menggambarkan teori tindakan

positivisme secara sederhana yakni : (1) tekanan terhadap rasional, (2) identifikasi rasional pada ilmu pengetahuan modern, (3) menganalisis beberapa elemen dalam satu kesatuan besar perilaku, (4) tujuan akhir yang diberikan dari berbagai derivasi pelakunya, (5) tindakan atau perlakuan yang irasional pada ilmu pengetahuan (Ritzer&Douglass, 2003).

Talcott Parsons melakukan prosedur dengan cara mengkritik perilaku masyarakat yang kemudian ditampilkan dalam bentuk konsep-konsep yang menjadi sintesa teori positivistik. Pemikiran kedua Talcott Parsons yakni teori positivistik berasal dari tradisi atau kebiasaan positivistik pula. Pengentasan teori tindakan sosial modern, harus lebih dulu mengetahui secara mendalam mengenai rasionalisasi tindakan. Maka dari itu aksi atau tindakan terdiri dari elemen-elemen: kondisi, maksud, dan tujuan. Rasionalitas dari suatu tindakan berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kondisi yang ada.

Talcott Parsons dalam teori tindakan voluntaristik mengkonseptualisasikan bahwa individu memiliki kemampuan untuk menentukan cara dan alat dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Dalam teori tindakan sosial Talcott Parsons, aktor diberikan kebebasan untuk menentukan alat atau alternatif lain untuk mencapai suatu tujuan (Rival Arlando, 2019 : 8). Elemen dalam tindakan voluntaristik yang dikonsepskan oleh Parsons adalah sebagai berikut:

- a.** Pelaku atau aktor, yakni individu yang dianggap sebagai individu yang hendak mencapai tujuan (*goal*). Aktor atau individu dipandang sebagai *goal seeking* (pemburu tujuan).

- b.** Dalam proses mencapai tujuan, aktor memiliki alat-alat, sarana atau alternatif untuk mencapai atau mendapatkan tujuan tersebut.
- c.** Pelaku atau individu dihadapkan pada kondisi situasional seperti keadaan batasan-batasan eksternal yang mempengaruhi penyeleksian tujuan dan alat-alat.
- d.** Pelaku atau individu diarahkan oleh nilai-nilai, norma-norma, dan ide-ide lain di mana ide-ide ini mempengaruhi apa yang dianggap sebagai tujuan serta mempengaruhi pula pemilihan alat-alat atau sarana untuk mencapai tujuan.
- e.** Tindakan meliputi pembuatan keputusan subjektif aktor mengenai alat-alat atau sarana untuk mencapai tujuan di mana semuanya dibatasi oleh ide-ide dan kondisi-kondisi situasional.

Aktor atau individu dalam mencapai tujuannya pada situasi dimana norma mengarahkannya pada saat memilih alternatif cara atau alat untuk berhasil mencapai tujuannya. Norma yang ada tidak menetapkan pilihannya terhadap alat atau cara yang hendak dilakukan. Namun penetapan pilihan ditentukan oleh kemampuan aktor dalam memilih. Kemampuan inilah yang dimaksud Parsons sebagai voluntaristik. Voluntaristik merupakan kemampuan individu atau aktor dalam melakukan tindakan atau menetapkan cara atau alat dari beberapa alternatif yang telah tersedia guna untuk mencapai tujuannya (Rival Arlando, 2019 : 8).

Konsep voluntaristik inilah yang menetapkan bahwa teori tindakan termasuk dalam paradigma definisi sosial. aktor dalam teori voluntaristik diartikan sebagai pelaku aktif dan kreatif serta memiliki kemampuan untuk menilai dan memilih alternatif tindakan. Walaupun aktor tersebut tidak memiliki



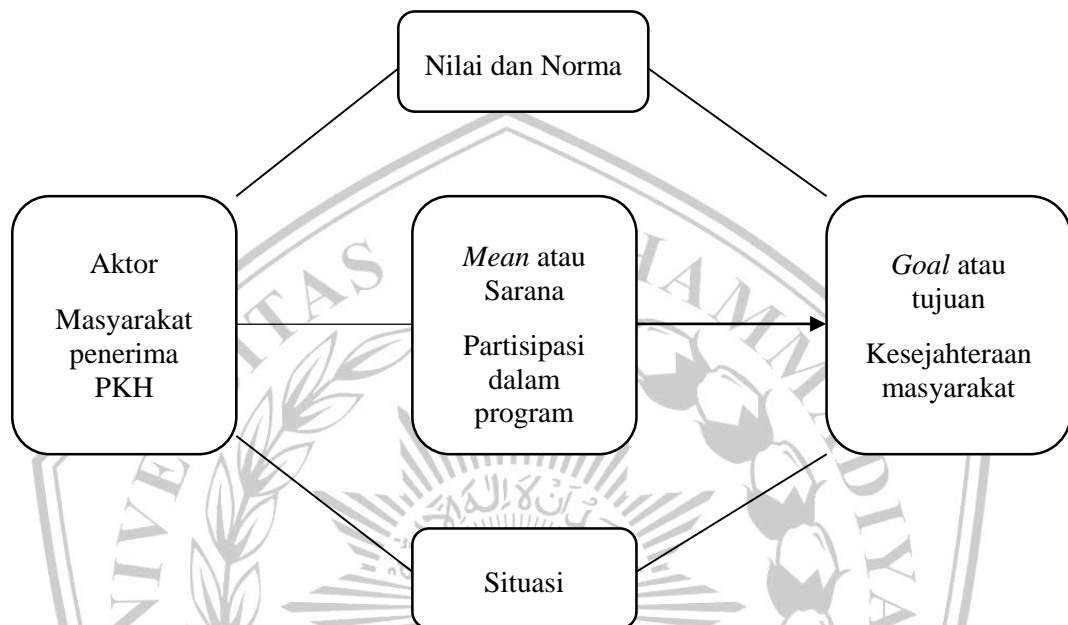
kebebasan secara total, namun memiliki kemauan bebas dalam memilih alternatif atau cara dalam tindakan.

Talcott Parsons mengembangkan cara berfikir individu yang irasional dengan mencetuskan teori sukarela. Teori tindakan voluntaristik memposisikan individu sebagai agen dari berbagai bagian struktur. Keputusan bersifat subjektif selalu ada, namun dibatasi oleh norma dan situasi. Interaksi antar individu diperlukan hadirnya struktur yang mengatur pola hubungan atau relasi antar individu atau aktor. Individu melakukan suatu tindakan harus mempunyai suatu gambaran mengenai proses dalam melaksanakan dan motivasi agar mencapai tujuan tersebut. Tindakan yang dilakukan aktor atau individu disesuaikan dengan norma yang berlaku dalam lingkungannya.

Di dalam teori tindakan voluntaristik alat dikenal *mean-ends framework*. Means dalam hal ini adalah alat-alat atau sarana yang digunakan aktor untuk mencapai tujuan. Dalam menggunakan alat-alat atau sarana tersebut, aktor juga mempertimbangkan norma dan situasi. Kaitannya dengan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PKH dapat dijelaskan bahwa masyarakat penerima PKH berperan sebagai aktor, dimana setiap aktor memiliki tujuan tertentu atau *goal* yakni kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut masyarakat penerima PKH sebagai aktor menggunakan *mean* atau alat sarana yang digunakan yakni partisipasi dalam program yang telah dibuat. Pada saat menggunakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat penerima PKH juga mempertimbangkan norma atau nilai dan juga situasi yang mempengaruhi pemilihan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Masyarakat penerima PKH akan melakukan tindakan mengenai sarana yang digunakan dalam pencapaian tujuan yang telah dibatasi oleh nilai dan norma.

**Gambar 2.1 Teori Tindakan Voluntaristik Talcott Parsons**



*Sumber : Rachmad KDS. 2016. 20 Tokoh Sosiologi Modern. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. Hlm 114*